



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOH. ROFI'
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 449387

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 473.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m2/206 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 380.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m2/206 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 92.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 233.250.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 RR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.750.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU MPV ALL NEW XENIA 1.3 MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 8.500.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 8.025.147



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	722.875.147
III. HUTANG	Rp.	248.390.318
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	474.484.829

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.